

INTISARI

KEDUDUKAN DAN PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) PADA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PEREMPUAN

Irianto Justisilvawan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka perempuan agar ketiadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) tidak memunculkan faktor viktimogen pada fase penyidikan. Penelitian ini turut pula mengetahui penyelesaian agar di dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka perempuan di tingkat Polsek dapat melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kolaboratif antara wawancara dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dan digunakan untuk menunjang data primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan spesifik. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, perlindungan hukum terhadap tersangka perempuan agar ketiadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polsek tidak menimbulkan faktor viktimogen pada fase penyidikan dilakukan dengan upaya sebagai berikut: a. tindakan penangkapan terhadap tersangka perempuan oleh polisi wanita (polwan); b. tindakan pemeriksaan terhadap tersangka perempuan tidak dilakukan pada malam hari; c. tindakan penahanan terhadap tersangka perempuan dilakukan di ruang tahanan khusus perempuan; d. tindakan pengeledahan badan tersangka perempuan dilakukan oleh polisi wanita; e. pendampingan oleh penasihat hukum, balai masyarakat, atau LSM; f. perlindungan dan fasilitas yang berkenaan dengan hak reproduksi perempuan. **Kedua**, cara penyelesaian di dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka perempuan di tingkat Polsek agar dapat melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah dengan melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres dalam hal penahanan terhadap tersangka perempuan dan/atau terjadi kesulitan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang tersangkanya perempuan.

Kata Kunci: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Hak-Hak Tersangka, Perlakuan Khusus Terhadap Perempuan

* Penulis adalah mahasiswa di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM.
Korespondensi Penulis: 082115146194; E-mail Irianto.j@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

THE POSITION AND ROLE OF UNIT PPA AT KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN RIGHTS PROTECTION OF FEMALE SUSPECT

Irianto Justisilvawan*

This research has purpose to know legal protection for female suspect in order to the absence of Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) at Kepolisian Sektor (Polsek) does not create any victimogen factor at investigation phase. This research also has purpose to know the solution so that when investigating female suspect at Polsek can involve the Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). This research is an empiric-descriptive research. The method of collecting data in this research are interview and literature research. Field research is carried to obtain primary data and literature research is carried to obtain secondary data and to support field research itself. The analysis used in this research is qualitative analytical data, it is analyzing and describing data through sentence forms separated according to existing categories to obtain clear and specific information. Based on the analysis in this research, the result figures that: **First**, legal protection for female suspect in order to the absence of Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) at Polsek does not create any victimogen factor at investigation phase done by the following efforts: a. arrest action carried out by woman police; b. the act of examining female suspect is not carried out at night; c. the act of detention of female suspect is carried out in female's detention room; d. the frisk for female suspect is carried out by female police; e. assistance by lawyer, correctional center, or NGO; f. protection and facilities relating to female's reproductive rights. **Second**, the solution so that when investigating female suspect at Polsek can involve the Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) is by doing coordination with Unit PPA Polres in the case of female suspect's detention and/or difficulties in investigating a criminal act which done by female suspect.

Keywords: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Suspect Rights, Affirmative Action for Female

* The Author is a college student in Criminal Law Departement Faculty of Law UGM.
Corresponding author: 082115146194; *E-mail* Irianto.j@mail.ugm.ac.id